

Jokowi dan Demokrasi Buzzer (Membaca Hiperrealitas Politik Jokowi dalam Ruang Publik Digital Indonesia)

Onessimus Febryan Ambun¹

¹Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email: Onessimvsfebryan@gmail.com

Abstract: *This article analyzes the role of President Joko Widodo (Jokowi) in consolidating his political power through a network of buzzers, which he has utilized as a tool for political manipulation. Jokowi's use of buzzers is not only aimed at boosting his popularity but also at suppressing criticism and opposition through disinformation. Using the simulacra theory of philosopher Jean Baudrillard, this article examines how the phenomenon of buzzers on social media creates a "simulacra democracy," a democracy that appears strong but is full of illusions. From this perspective, it becomes clear how Indonesian democracy is increasingly ensnared in digital hyperreality, blurring the boundaries between reality and representation. This article also discusses the impact of buzzers on public political participation, the growing distrust in democracy, and freedom of speech, as well as potential efforts to restore democratic integrity. The research uses a qualitative descriptive method. Data sources include books, research findings, journal articles, and online sources. The findings reveal that Jokowi's buzzers play a significant role in shaping public perception and often distort democratic values, creating a dangerous climate of political manipulation.*

Key words: *Jokowi, Democracy, Buzzer, Hiperreality, Simulacra.*

Pendahuluan

Sebagai tokoh yang diidolakan karena citra merakyatnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk basis dukungan yang kuat sejak awal karier politiknya di panggung nasional. Di awal kemunculannya dalam kontestasi-kontestasi elektoral pada tahun 2012 (Pilgub DKI) dan 2014 (Pilpres), Jokowi muncul sebagai representasi politik baru yang revolusioner. Dengan pendekatan yang lebih sederhana dan dekat dengan rakyat, tukang kayu asal Solo ini menjadi simbol perubahan dan harapan baru bagi demokrasi Indonesia. Namun, di balik citra positif tersebut, terselip strategi komunikasi politik yang sangat terorganisir dan terencana, di mana *buzzer* (pendengung) digital di media-media sosial menjadi salah satu instrumen utamanya. *Buzzer*, yang awalnya digunakan untuk tujuan komersial, kini berfungsi sebagai alat politik yang digunakan untuk mempengaruhi dan membentuk persepsi publik sesuai dengan kepentingan politik pemerintah.

Penggunaan *buzzer* sebagai instrumen dalam strategi politik Jokowi mulai terlihat sejak kampanye Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2012. Strategi ini kemudian berkembang pesat pada pemilihan presiden

2014 dan 2019.¹ Bahkan, menurut Hermawan Yulianto, penggunaan *Buzzer* oleh Jokowi juga digalakkan untuk memenangkan anaknya menjelang Pilpres 2024. Dengan memanfaatkan akun-akun anonim di media-media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dll., *buzzer* bertugas untuk menyebarkan pesan yang dikontrol dengan ketat demi menciptakan narasi positif tentang Jokowi, keluarga, dan kebijakannya, serta dengan diam-diam meredam kritik dari oposisi dengan memanipulasi opini publik melalui disinformasi.² Di sini, mesin-mesin *buzzer* bekerja secara simultan. Mereka menyebarkan propaganda pro-pemerintah dan menyerang lawan politik, baik dengan konten faktual yang sudah diatur narasinya maupun disinformasi yang menciptakan kebingungan. Dengan gerakan terstruktur dan masif ini, *buzzer-buzzer* tidak hanya bertugas membentuk persepsi publik, tetapi juga menciptakan realitas politik yang sesuai dengan kepentingan penguasa.

Fenomena *buzzer* yang hijrah ke dunia politik akhir-akhir ini telah menempatkan demokrasi Indonesia dalam ancaman. Sejumlah kajian terdahulu telah melihat bahwa peran *buzzer* dalam konteks pemerintahan Jokowi sudah menimbulkan gejala yang tidak sehat. Misalnya, penelitian Mohammad Abbiyu dan Diah Nindyaswari yang berjudul “Penggunaan *Buzzer* dalam Hegemoni Pemerintahan Joko Widodo”, dan juga penelitian dari Hermawan Yulianto, dengan judul: “Fenomena *Buzzer* dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia”, sama-sama menunjukkan bahwa *buzzer* di era pemerintahan Jokowi tidak hanya menggerakkan opini publik, tetapi juga secara aktif digunakan untuk meredam kritik dengan narasi yang membela pemerintah. Dalam kajian-kajian tersebut, penggunaan *buzzer* sebagai alat dalam strategi politik Jokowi di negeri ini pada hakikatnya tidak hanya mengubah cara kampanye politik dilakukan, tetapi juga secara fundamental mempengaruhi karakter ruang publik dalam demokrasi Indonesia. Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat diskusi yang bebas dan terbuka telah didominasi oleh *buzzer*.³

Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu di atas, melalui teori Simulakra Baudrillard, artikel ini hendak menganalisis bagaimana Jokowi dan pemerintahannya merusak demokrasi dalam ruang publik dengan memanfaatkan jaringan *buzzer* sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politiknya. Dalam artikel ini, terlihat jelas bahwa jaringan *buzzer* yang diupah pemerintah telah menciptakan “hiperrealitas”—istilah yang dipinjam dari Jean Baudrillard—di mana representasi yang mereka sebarakan menggantikan realitas politik yang sesungguhnya. Hiperrealitas yang muncul akibat *buzzer* ini dapat membuat kebenaran menjadi kabur dan tidak lagi menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan politik.⁴ Dalam konteks Indonesia, fenomena ini pada akhirnya menyebabkan publik semakin sulit untuk membedakan antara fakta dan manipulasi, yang pada gilirannya meredam partisipasi politik yang kritis, sehat, dan demokratis. Dari masalah yang begitu memprihatinkan ini, pertanyaan pokok yang harus

¹ Mohammad Darry Abbiyyu dan Diah Asri Nindyaswari, “Penggunaan *Buzzer* dalam Hegemoni Pemerintahan Joko Widodo”, dalam *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 71.

² Hermawan Yulianto, “Fenomena *Buzzer* dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia”, dalam *JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2023), hlm. 150-151.

³ Mohammad Darry Abbiyyu dan Diah Asri Nindyaswari, *op. cit.*, hlm. 70-81. Lih. juga Hermawan Yulianto, *ibid.*, hlm. 147-152.

⁴ Timothy W. Luke, “Power and Politics in Hyperreality: The Critical Project of Jean Baudrillard”, dalam *The Social Science Journal*, Vol. 28, No. 3, hlm. 347-367.

dijawab ialah: “Bagaimana jaringan *buzzer* Jokowi yang menciptakan hiperrealitas sehingga merusak demokrasi Indonesia dapat dipahami dan diatasi? Apa yang harus dilakukan agar demokrasi di negeri ini dapat diselamatkan?”

Dalam konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Melalui metode deskriptif kualitatif (kepuustakaan), dengan sumber data yang terdiri dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan sumber daring lainnya, artikel ini akan membahas dengan detail bagaimana Jokowi dan pemerintahannya memanfaatkan jaringan *buzzer* sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politiknya dengan menciptakan hiperrealitas sehingga merusak demokrasi, dan bagaimana fenomena destruktif ini dapat diatasi. Namun, sebelum mendalami lebih jauh masalah tersebut, akan disajikan terlebih dahulu pengertian, cara kerja, dan evolusi *buzzer* sebagai instrumen politik yang dimanfaatkan oleh Jokowi dalam percaturan politik Indonesia, serta dampak fenomena *buzzer* ini pada ruang publik, partisipasi politik, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Jokowi dan Transformasi *Buzzer* Sebagai Instrumen Kekuasaan Politik

Penggunaan *buzzer* dalam politik Indonesia telah mengalami transformasi signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang memanfaatkan mereka sebagai bagian dari strategi komunikasi politik. Istilah *buzzer* yang digunakan dalam strategi politik ini pada dasarnya berasal dari praktik *buzz marketing*, yang mengacu pada teknik pemasaran untuk menciptakan ketertarikan dan meningkatkan visibilitas suatu produk melalui komunikasi yang intens dan terarah. Dalam Bahasa Inggris, istilah *buzzer* ini diambil dari kata *buzz* yang berarti dengungan. Di awal perkembangannya, *buzzer* digunakan untuk kampanye persaingan marketing dalam media sosial.⁵ Namun, dalam konteks politik, terutama di Indonesia, *buzzer* kemudian pelan-pelan berubah fungsi menjadi alat untuk membentuk opini publik dan mengarahkan dukungan politik dengan cara yang strategis.

Sebagai sebuah instrumen dalam dunia komersil maupun dalam dunia politik, cara kerja *buzzer* pada hakikatnya terkait dengan etimologinya, yakni pendengung. Sebagai pendengung, cara kerja *buzzer* mencakup penyebaran informasi yang terorganisir dan sistematis di media sosial, seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, dll., dengan Twitter sebagai platform utama yang digunakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Miqdad, Twitter sangat efektif dibanding media sosial lain untuk tujuan ini karena sifatnya yang real-time dan kemampuannya menciptakan *trending topics* melalui penggunaan *hashtags*. *Buzzer*, yang bekerja dalam Twitter, biasanya menggunakan akun-akun anonim atau palsu yang didesain untuk menyebarkan narasi tertentu secara masif. Mereka secara kolektif memanfaatkan algoritma platform untuk mempromosikan konten, sehingga topik yang diinginkan menjadi viral.⁶ Hal ini pada akhirnya menciptakan kesan bahwa opini tersebut adalah pandangan umum masyarakat. Contoh konkretnya bisa dilihat dari cara kerja *buzzer* untuk mengangkat narasi positif mengenai Jokowi, di mana ia dianggap sebagai pemimpin yang dekat orang kampung, pedagang sayur, pemulung, dsb. Padahal,

⁵ Hermawan Yulianto, *op. cit.*, hlm. 149.

⁶ *Ibid.*

kedekatan tersebut sebenarnya hanyalah pencitraan semata. Menurut Edward Aspinall dan Ward Berenschot, dalam buku yang berjudul *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, Jokowi dianggap sebagai manipulator politik ulung. Anggapan ini diberikan karena Jokowi dinilai sangat lihai membuat pencitraan di mata publik melalui para *buzzer* di berbagai media.⁷ Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan Mohammad Darry Abbiyyu dan Diah Asri Nindyaswari, selama kampanye pemilihan presiden 2014 dan 2019, banyak *buzzer* yang menggunakan *hashtag* seperti #JokowiHebat dan #JokowiBaik untuk mempromosikan citra positif Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui konten visual, meme, dan narasi yang menggugah, mereka berhasil menarik perhatian publik dan mengubah persepsi masyarakat tentang kebijakan dan tindakan Jokowi dalam pemerintahan.⁸

Seiring majunya teknologi dan berkembangnya kebutuhan politis, *buzzer* politik di dunia digital semakin hari semakin berkembang penggunaannya. Perkembangan *buzzer* sebagai instrumen politik dan kekuasaan pada dasarnya sangat terlihat dalam pergeseran fungsinya dari sekadar alat kampanye menjadi alat yang digunakan untuk menyerang lawan politik dan kritik. Selama masa pemerintahannya, Jokowi menggunakan *buzzer* untuk menghadapi protes dan demonstrasi, seperti yang terjadi pada aksi #ReformasiDikorupsi, di mana *buzzer* membangun narasi bahwa aksi tersebut didasarkan pada kepentingan ekonomi alias dibayar oleh kelompok tertentu. Narasi seperti “Jokowi adalah orang baik” dan “Tidak semua kesalahan adalah kesalahan Jokowi” menjadi alat defensif yang sering digunakan oleh *buzzer* untuk menciptakan citra positif presiden sekaligus menangkis kritik yang muncul. Selain itu, pada penanganan isu Covid-19, *buzzer* berperan dalam meredam analisis negatif dan menyebarkan klaim bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik, meskipun data menunjukkan banyak kekurangan dalam penanganan pandemi.⁹ Yang tak kalah menarik, penggunaan *buzzer* juga terlihat dalam berbagai kampanye yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Misalnya, saat Jokowi mempromosikan program pembangunan infrastruktur masifnya, *buzzer* sering menyerang pihak-pihak yang skeptis terhadap proyek tersebut. Seorang *buzzer* terkenal, Iman Brotoseno (mantan Dirut TVRI), pernah menanggapi kritik terhadap pembangunan infrastruktur dengan mengajak masyarakat untuk melihat kemajuan yang telah dicapai, sambil menegaskan bahwa mereka yang mengkritik adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap perkembangan bangsa: “Yang nyinyirin Jokowi bangun infrastruktur sebaiknya mudik jangan lewat tol. Lewat jalan yang dibangun Daendels saja”.¹⁰ Komentarnya ini, pada akhirnya menciptakan atmosfer di mana kritik dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan, dan sebaliknya, dukungan terhadap pemerintah dianggap sebagai bentuk patriotisme.

Selain itu, *buzzer* juga aktif dalam melakukan intimidasi terhadap individu atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Dalam kasus penyerangan terhadap tokoh-tokoh kritis seperti Novel Baswedan dan Rasio Patra, *buzzer* tidak segan-segan menggunakan akun-akun anonim

⁷ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), hlm. 226.

⁸ Mohammad Darry Abbiyyu dan Diah Asri Nindyaswari, *op. cit.*, hlm. 75-76.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

untuk menyerang reputasi dua tokoh tadi dan masyarakat yang mendukung mereka di media sosial. Tindakan ini menunjukkan bagaimana *buzzer* telah menjadi alat politik yang efektif dari pemerintah untuk menutup mulut kritik dan menciptakan iklim ketakutan di kalangan masyarakat, sehingga banyak yang enggan untuk bersuara. Tak hanya itu, faktanya, *buzzer* yang mendukung pemerintah tampaknya dilindungi dari jeratan pasal UU ITE. Melalui tindakan ini, pemerintahan Jokowi, yang terpilih secara demokratis, justru tampak bertransformasi menjadi rezim otoriter dengan membungkam dan mengkriminalisasi suara-suara kritis di media sosial.¹¹ Dalam konteks ini, *buzzer* bertindak untuk sepenuhnya mendukung kepentingan pemerintah dan mengintimidasi lawan politik mereka.

Selain sebagai alat propaganda politik, *buzzer* juga memiliki peran strategis dalam mengontrol narasi publik mengenai isu-isu sensitif yang dapat merugikan pemerintah. Mereka dengan cepat merespons kritik, baik terhadap kebijakan Jokowi maupun terhadap pejabat pemerintah lainnya, dengan cara menyebarkan disinformasi atau memutarbalikkan fakta. Misalnya, dalam kasus protes terhadap RUU Cipta Kerja, *buzzer* secara aktif menyebarkan klaim bahwa para pengunjung rasa tidak memahami isi undang-undang dan hanya diprovokasi oleh pihak oposisi.¹² Tindakan semacam ini tidak hanya meredam perlawanan, tetapi juga menciptakan kebingungan di tengah masyarakat, membuat publik sulit membedakan antara informasi yang valid dan propaganda. Akibatnya, ruang diskusi demokratis di media sosial semakin tergerus, dan opini-opini yang menentang kebijakan pemerintah sering kali diserang secara terorganisir. Fenomena ini pada akhirnya menciptakan tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia, karena ketidakmampuan publik untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang dimanipulasi dapat mengarah pada pembentukan opini publik yang tidak berdasar pada fakta, serta mengancam keberadaan ruang diskusi yang sehat dalam masyarakat.¹³

Hiperrealitas dan Distorsi Realitas Politik di Indonesia

Jean Baudrillard, melalui teorinya tentang *simulakra* dan *hiperrealitas*, menggambarkan bagaimana representasi yang dihasilkan oleh media modern tidak hanya menggantikan realitas itu sendiri, tetapi menciptakan kondisi di mana batas antara realitas dan simulasi menjadi kabur. Dalam konteks politik Indonesia, penggunaan *buzzer* oleh pemerintahan Jokowi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, telah membentuk semacam hiperrealitas, di mana citra yang diciptakan lebih mendominasi daripada realitas politik yang sesungguhnya. Di sini, *buzzer* menyebarkan informasi yang menguntungkan pemerintah dengan strategi yang terencana, mengulang-ulang narasi yang sesuai dengan kepentingan elit. Fenomena ini akhirnya menimbulkan kesulitan bagi publik dalam membedakan fakta dari hasil konstruksi/manipulasi. Baudrillard menyebut situasi ini sebagai fase di mana simulasi menggantikan realitas: "*simulation is no longer that of a territory, a referential being or a substance. It is the generation*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 74.

¹² Jonathan Patrick, "Awal Protes Omnibus Law hingga Gaduh di Media Sosial", dalam *CNN Indonesia* (07/10/20), <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201007155245-192-555553/awal-protes-omnibus-law-hingga-gaduh-di-media-sosial>, diakses pada 12 Oktober 2024.

¹³ Jonathan Adi Wijaya, dkk., "Pendukung Politik dalam Perspektif Michel Foucault", dalam *Akademika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero*, Vol. 23, No. 2, hlm. 42.

by models of a real without origin or a reality: a hyperreal” (“Simulasi bukan lagi representasi dari suatu wilayah, suatu makhluk referensial atau substansi. Simulasi adalah generasi model dari sebuah realitas yang tanpa asal usul: suatu hiperrealitas”).¹⁴ Bagi Baudrillard, dalam keadaan seperti ini, realitas politik terselubung dalam lapisan citra yang semakin jauh dari kebenaran.

Baudrillard menjelaskan bahwa dalam dunia *hiperrealitas*, representasi yang dihasilkan oleh media menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Dalam politik Indonesia, *buzzer-buzzer* Jokowi bertugas menyebarkan narasi pro-pemerintah yang konsisten dan sering kali mendistorsi fakta, sehingga publik kesulitan membedakan antara kenyataan dan propaganda. Fenomena ini menggambarkan apa yang oleh Baudrillard disebut sebagai "likuidasi referensial," di mana tanda-tanda realitas tidak lagi memiliki hubungan yang jelas dengan objek yang mereka wakili. Sebagai gantinya, simulasi mengambil alih, menciptakan realitas semu yang lebih diterima daripada fakta.¹⁵ Baudrillard menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, "simulasi melampaui perbedaan antara ruang dan waktu, pengirim dan penerima, medium dan pesan, ekspresi dan konten," sehingga menyebabkan hilangnya makna nyata dan menghasilkan manipulasi total.¹⁶ Dalam konteks politik Indonesia, ini tampak dalam strategi *buzzer* yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi positif tentang pemerintahan Jokowi, sementara kritik dan fakta-fakta yang berlawanan dikaburkan atau diserang. Realitas politik di Indonesia kemudian tidak lagi didasarkan pada fakta, tetapi pada citra yang terus disebar dan diulang oleh *buzzer*, yang pada akhirnya memperkuat kekuasaan Jokowi dalam kondisi hiperrealitas.

Di dalam kerangka simulakra yang diuraikan oleh Baudrillard, para *buzzer* bukan hanya menciptakan representasi palsu dari kenyataan politik, tetapi mereka juga membentuk lingkungan di mana kebohongan atau manipulasi diulang sedemikian rupa hingga menjadi "kebenaran" yang baru di benak masyarakat. Dalam fase ini, menurut Baudrillard, sebagaimana dijelaskan Filippo Silvestri, “tanda-tanda dan simbol-simbol yang mereka sebar dalam media massa-sosial menjadi lebih nyata dan lebih diterima daripada fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga ruang untuk debat kritis untuk mengkaji hal yang mereka sebar tersebut semakin terkikis”.¹⁷ Di sini, *buzzer* menciptakan ilusi partisipasi demokratis dalam ruang publik yang sesungguhnya kosong—di mana perdebatan dan kritik tampak ada, tetapi sesungguhnya hanya bentuk representasi yang dikendalikan. Di sinilah kekuatan manipulatif *buzzer* semakin memperdalam distorsi realitas politik, dengan menciptakan kenyataan yang diatur oleh elite politik, namun dikemas sebagai kehendak atau konsensus publik. Situasi ini memperlemah fondasi demokrasi yang seharusnya memungkinkan diskusi terbuka dan transparan, dan menyiapkan konteks bagi bagaimana hiperrealitas ini memengaruhi ruang publik, partisipasi politik, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

¹⁴ Timothy W. Luke, *op. cit.*, hlm. 350.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 351.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Filippo Silvestri, “Baudrillard’s Hyperreality and its simulacral foundation”, dalam *Rivista Italiana Di Filosofia Del Linguaggio* (2022), hlm. 47.

Dampak Jaringan *Buzzer* dan Politik Simulakra pada Demokrasi Indonesia

Penggunaan jaringan *buzzer* oleh Jokowi dalam politik Indonesia telah membawa dampak signifikan bagi kualitas demokrasi di Indonesia, terutama terkait informasi yang menyebar di ruang publik digital dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam tema-tema sebelumnya, jaringan *buzzer* sering kali berfungsi untuk memperkuat posisi pemerintahan Jokowi dengan cara manipulatif, melalui disinformasi, hoaks, dan propaganda yang dikoordinasikan secara masif di media sosial. Hal ini pada akhirnya merusak kemampuan publik untuk mengevaluasi kebijakan dan tindakan elit politik secara objektif. Disinformasi yang menyebar luas di ruang publik mengaburkan perbedaan antara fakta dan opini yang direayasa dan menciptakan hiperrealitas yang, menurut teori Baudrillard, mengubah politik menjadi suatu bentuk simulakra di mana kebenaran dan ilusi menjadi tidak terbedakan.

Keberadaan *buzzer* pada hakikatnya telah berdampak buruk bagi kualitas ruang publik yang menjadi pilar demokrasi Indonesia. Selain telah menciptakan hiperrealitas dengan mengaburkan kebenaran dari kepalsuan melalui narasi-narasi manipulatif, menurut Iim Halimatusa'diyah dan Ronald Adam, dalam tulisannya tentang dampak *buzzer* bagi demokrasi Indonesia, jaringan *buzzer* yang diupah oleh pemerintahan Jokowi juga bertanggungjawab terhadap kurangnya kualitas ruang publik yang bebas dan terbuka untuk diskusi politik yang kritis di negeri ini. Kebebasan berpendapat di ruang publik yang menjadi dasar demokrasi kini terancam oleh dominasi narasi *buzzer-buzzer* Jokowi di ruang digital. Disinformasi yang mereka sebarkan mengalihkan perhatian publik dari isu-isu substansial ke perdebatan superfisial yang sering kali penuh dengan kebencian dan propaganda. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak lagi bebas mengekspresikan pendapat kritis tanpa takut dibungkam atau diserang oleh akun *buzzer* yang pro-pemerintah.¹⁸

Dampak jaringan *buzzer* yang diupah oleh pemerintahan Jokowi lainnya adalah meningkatnya polarisasi politik di masyarakat. Menurut penelitian dari Fawwaz Daeni, dkk., polarisasi ini tampak jelas selama Pemilu DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, ketika *buzzer* memobilisasi sentimen identitas dan kebencian berbasis agama.¹⁹ Situasi ini tidak hanya memperburuk hubungan antar kelompok masyarakat tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang nyata. Polarisasi yang dibangun oleh *buzzer* mengurangi kemampuan masyarakat untuk melihat perbedaan pandangan sebagai bagian dari demokrasi yang sehat, sehingga mempersempit ruang untuk diskusi terbuka dan mengancam stabilitas sosial di Indonesia.²⁰

¹⁸ Iim Halimatusa'diyah dan Ronald Adam, "Political *Buzzer* Networks as Threat to Indonesian Democracy", dalam *PPIM UIN Jakarta*, <https://ppim.uinjkt.ac.id/2024/09/11/political-buzzer-networks-as-threat-to-indonesian-democracy/>, diakses pada 13 Oktober 2024.

¹⁹ Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, dkk., "Pengaruh *Buzzer* Politik dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi", dalam *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 185.

²⁰ Bambang Santoso, dkk., "Simulakra Teknologi Digital di Era *Post Truth*", Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019, hlm. 145-146.

Lebih jauh lagi, para *buzzer* Jokowi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Publik yang terus-menerus terpapar disinformasi menjadi semakin skeptis terhadap media, lembaga politik, dan bahkan pemerintah sendiri. Ketika masyarakat merasa bahwa informasi yang mereka terima telah dimanipulasi, kepercayaan terhadap proses politik menurun drastis, yang pada gilirannya melemahkan partisipasi politik yang sehat. Keadaan ini menjadikan masyarakat lebih apatis dan kurang berani mengkritik pemerintah karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh dalam iklim politik yang dikendalikan oleh *buzzer*.²¹

Keberadaan *buzzer* juga memperparah ketidaksetaraan politik, karena pihak-pihak (partai-partai, ormas-ormas, dll.) dengan kekuatan finansial besar dapat membiayai *buzzer* untuk mengarahkan opini publik. Ketidaksetaraan ini menjadikan ruang digital dikuasai oleh kelompok yang lebih kuat secara ekonomi, sehingga membuat suara rakyat biasa menjadi semakin tidak terdengar. Dalam kondisi ini, hanya aktor politik yang memiliki dana besar yang mampu memobilisasi *buzzer* untuk mendominasi narasi publik. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam representasi suara publik, sehingga demokrasi di Indonesia jauh dari prinsip kesetaraan politik.²² Hal ini terbukti dari ketakterkalahannya Jokowi dan keluarganya dalam kontestasi politik di negeri ini, di mana pesaing-pesaing politik mereka tidak memiliki dana dan kekuatan yang cukup untuk mendominasi narasi politik dalam kampanye.

Selain itu, *buzzer* merusak independensi media dan kebebasan pers. Media yang kritis terhadap Jokowi dan pemerintahannya kerap menjadi sasaran serangan *buzzer*. Hal ini berakibat pada kurangnya keberanian media dalam mengungkap isu-isu yang penting dan kritis. Ketika media digerogoti oleh intimidasi *buzzer*, fungsi media sebagai pilar demokrasi menjadi lemah. Ini mengakibatkan berkurangnya akses publik terhadap informasi yang akurat dan berimbang, serta mempersempit ruang untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, *buzzer* tidak hanya merusak ruang publik digital tetapi juga melemahkan seluruh institusi yang seharusnya menopang demokrasi.²³

Dalam jangka panjang, keberadaan jaringan *buzzer* dapat mempercepat kemunduran demokrasi di Indonesia. Manipulasi informasi yang terstruktur ini menyebabkan masyarakat hidup dalam hiperrealitas politik, yang penuh dengan citra-citra palsu dan narasi yang dikendalikan. Demokrasi, yang semestinya memberi ruang untuk partisipasi kritis dan transparansi, beralih menjadi simulasi demokrasi di mana citra lebih penting daripada substansi. Pada akhirnya, keberadaan *buzzer* politik yang merupakan ulah Jokowi mengarahkan Indonesia pada sistem politik yang semakin sulit untuk transparan dan jujur, sehingga demokrasi hanya tampak di permukaan tanpa esensi yang kuat di dalamnya.

Restorasi Ruang Publik: Upaya Menangkal Demokrasi *Buzzer*

Untuk memulihkan kualitas demokrasi Indonesia dari ancaman yang ditimbulkan oleh jaringan *buzzer* politik Jokowi yang selama ini telah merusak demokrasi bangsa, perlu dilakukan serangkaian

²¹ Im Halimatusa'diyah dan Ronald Adam, *loc. cit.*

²² *Ibid.*

²³ Mohammad Darry Abbiyyu dan Diah Asri Nindiyaswari, *op. cit.*, hlm. 77.

langkah strategis untuk membentuk ruang publik yang sehat, bebas dari manipulasi, dan mampu menampung partisipasi kritis masyarakat. Sebab, bagi Jürgen Habermas, ruang publik adalah fondasi utama demokrasi deliberatif, tempat warga negara bisa berpartisipasi dalam diskusi rasional, tanpa terdistorsi oleh kekuatan apapun.²⁴ Dalam konteks Indonesia, salah satu langkah paling mendasar adalah meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka dapat mengenali disinformasi dan manipulasi yang disebarkan oleh *buzzer*. Menurut Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, dkk., literasi digital perlu untuk dilaksanakan karena pada hakikatnya literasi bukan saja hanya soal kemampuan teknis seseorang untuk mengolah informasi, tetapi juga tentang membangun pola pikir kritis dalam menyaring informasi. Program-program literasi ini dapat melibatkan kurikulum di sekolah, program-program di komunitas, serta kampanye media yang bertujuan mengajarkan masyarakat cara membedakan informasi yang kredibel dari disinformasi yang diproduksi oleh jaringan *buzzer*.²⁵

Selain itu, pemerintah perlu memperketat regulasi terkait penggunaan *buzzer* dalam politik. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hukum ini belum secara spesifik mengatur aktivitas *buzzer* politik yang dimobilisasi untuk menyebarkan disinformasi atau intimidasi.²⁶ Pemerintah dan lembaga legislatif harus mempertimbangkan untuk merancang regulasi yang lebih tegas dan spesifik, yang tidak hanya menghukum penyebaran informasi palsu tetapi juga melindungi kebebasan berpendapat dari manipulasi terorganisir.²⁷ Regulasi ini perlu difokuskan pada transparansi dan akuntabilitasnya untuk memastikan bahwa aktor politik yang terlibat dalam praktik *buzzer* diawasi dengan ketat.

Lebih dari itu, menurut Yatun Sastramidjaja, seorang pengamat media terkenal, perusahaan media sosial perlu dilibatkan sebagai bagian dari solusi untuk menanggulangi pengaruh *buzzer* politik. Platform-platform besar seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memiliki tanggung jawab untuk memperketat kebijakan moderasi konten mereka dan meningkatkan mekanisme deteksi terhadap akun-akun anonim atau otomatis yang menyebarkan disinformasi. Platform ini dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan algoritma yang lebih baik dalam mendeteksi aktivitas *buzzer*. Selain itu, perusahaan media sosial harus lebih transparan dalam mempublikasikan data aktivitas akun-akun yang terkait dengan *buzzer*, agar masyarakat dapat memahami sejauh mana pengaruh mereka di ruang publik digital.²⁸

Langkah penting lainnya adalah memperkuat independensi media dalam ruang publik sebagai penjaga demokrasi. Media yang bebas dan independen memainkan peran penting dalam membongkar aktivitas *buzzer*, memberi informasi kepada publik, dan menyeimbangkan narasi yang didorong oleh *buzzer* politik. Dengan dukungan regulasi yang melindungi independensi jurnalisme serta keberanian media untuk mengungkap praktik *buzzer* yang merugikan, demokrasi dapat dipulihkan dari pengaruh

²⁴ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 132-134.

²⁵ Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, dkk., *op. cit.*, hlm. 198.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Rio Nanto, "Hoaks dan Demokrasi", dalam *Politik Era Milenial: Butir-Butir Esai Politik Populer* (Mauere: Ledalero, 2020), hlm. 117-118.

²⁸ Yatun Sastramidjaja, "Beating the buzzers", dalam *Inside Indonesia*, <https://www.insideindonesia.org/editions/edition-146-oct-dec-2021/beating-the-buzzers>, diakses pada 14 Oktober 2024.

manipulasi digital. Di samping itu, media juga harus menginvestasikan sumber daya pada jurnalisme investigatif yang berfokus pada peliputan isu-isu yang ditutupi oleh narasi *buzzer*, sehingga masyarakat memiliki akses ke informasi yang akurat dan transparan.²⁹

Upaya-upaya ini, jika diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, dapat membantu mengembalikan demokrasi Indonesia yang sudah jatuh oleh Jokowi, ke jalur yang lebih inklusif, terbuka, dan berintegritas. Namun, hal yang mesti disadari ialah bahwa restorasi demokrasi yang sudah rusak ini bukanlah langkah yang dapat dicapai dalam waktu semalam. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan media untuk menjaga ruang publik yang sehat dan mampu menampung perbedaan pendapat tanpa manipulasi, sehingga terciptalah “masyarakat komunikatif”, yang bagi Habermas adalah masyarakat di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam dialog yang setara, bebas dari dominasi dan distorsi. “Masyarakat komunikatif” ini hanya mungkin terbentuk jika ada komitmen bersama untuk membangun ruang publik yang menghargai pluralitas dan menjunjung tinggi rasionalitas. Artinya, segala bentuk komunikasi dalam masyarakat harus didasarkan pada prinsip keterbukaan dan kejujuran, bukan pada kekuasaan atau kepentingan sepihak yang seringkali mendominasi opini publik.³⁰ Dengan bersinergi untuk menolak manipulasi Jokowi dan mengembalikan nilai-nilai seperti kebebasan, transparansi, dan kejujuran dalam ruang publik, Indonesia dapat bergerak menuju demokrasi yang sejati, di mana suara rakyat (masyarakat komunikatif) menjadi dasar bagi pengambilan keputusan politik tanpa adanya distorsi dari *buzzer* melalui hiperrealitas manipulatif.

Penutup

Fenomena *buzzer* di bawah pemerintahan Jokowi telah menjadi cerminan bagaimana politik Indonesia bergeser dari ruang publik terbuka menjadi medan manipulasi digital. Dengan menggunakan *buzzer* sebagai instrumen kekuasaan, Jokowi bertanggung jawab atas terciptanya hiperrealitas politik, di mana batas antara kebenaran dan ilusi semakin kabur. Demokrasi yang seharusnya mengedepankan transparansi dan partisipasi kritis kini tereduksi menjadi arena propaganda yang dikendalikan oleh narasi-narasi buatan. Ini merupakan konsekuensi langsung dari upaya untuk menguatkan kekuasaan melalui manipulasi opini publik, yang tidak hanya merusak integritas demokrasi, tetapi juga memicu apatisme dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Dampak dari hiperrealitas ini sangat jelas terlihat. Partisipasi politik yang seharusnya kritis dan terbuka kini dirusak oleh polarisasi dan ketakutan akan serangan *buzzer* digital. Ruang diskusi publik, yang dulu menjadi arena perdebatan sehat dan konstruktif, telah berubah menjadi medan pertempuran disinformasi. Akibatnya, banyak masyarakat menjadi semakin apatis, tidak percaya pada kebenaran yang disampaikan oleh media, dan merasa suara mereka tidak lagi memiliki dampak yang signifikan. Jokowi,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 17-18.

sebagai sosok yang bertanggung jawab atas munculnya strategi politik ini, merupakan pelaku utama yang membuat demokrasi bangsa ini menjadi mandeg.

Untuk mengembalikan kualitas demokrasi Indonesia yang sudah menyusut akibat kepemimpinan Jokowi, diperlukan upaya kolektif untuk memulihkan ruang publik dari cengkeraman *buzzer*. Hal paling utama yang harus dilakukan ialah bahwa masyarakat harus dididik dengan literasi digital yang lebih baik agar mampu mengenali dan menolak manipulasi. Selain itu, pemerintah juga harus menetapkan regulasi yang lebih ketat untuk membatasi aktivitas *buzzer* di ranah politik. Yang terakhir, media yang bebas dan independen perlu didukung penuh agar dapat menyuarakan kebenaran tanpa takut diintimidasi oleh kekuatan *buzzer*.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia sangat tergantung pada upaya-upaya kolektif di atas. Jika ruang publik digital berhasil dipulihkan dari jejak-jejak kotor Jokowi dan masyarakat kembali berpartisipasi secara kritis, Indonesia dapat membangun kembali demokrasi yang sehat, inklusif, dan berintegritas. Dalam dunia di mana hiperrealitas semakin mendominasi seperti saat ini, masyarakat bertugas untuk tetap memastikan bahwa demokrasi tetap berlandaskan pada kebenaran, bukan pada citra atau manipulasi yang kosong. Di sini, diperlukan sinergi antar warga masyarakat untuk menciptakan jaringan dukungan yang memperkuat gerakan-gerakan demokratis. Melalui sinergi ini, masa depan demokrasi Indonesia bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kemungkinan yang nyata dan layak diperjuangkan.

Daftar Rujukan

- Abbiyyu, Mohammad Darry, dan Diah Asri Nindyaswari. "Penggunaan *Buzzer* dalam Hegemoni Pemerintahan Joko Widodo." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2019.
- Daeni, Fawwaz Ihza Mahendra, dkk. "Pengaruh *Buzzer* Politik dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi." *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 2 (2023).
- Halimatulsa'diyah, Iim, and Ronald Adam. "Political *Buzzer* Networks as Threat to Indonesian Democracy." *PPIM UIN Jakarta*, 11 Sept. 2024, <https://ppim.uinjkt.ac.id/2024/09/11/political-buzzer-networks-as-threat-to-indonesian-democracy/>, diakses pada 13 Oktober 2024.
- Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- . *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Luke, Timothy W. "Power and Politics in Hyperreality: The Critical Project of Jean Baudrillard." *The Social Science Journal*, Vol. 28, No. 3 (1991).
- Nanto, Rio. "Hoaks dan Demokrasi." *Politik Era Milenial: Butir-Butir Esai Politik Populer*. Maumere: Ledalero, 2020.
- Patrick, Jonathan. "Awal Protes Omnibus Law hingga Gaduh di Media Sosial." *CNN Indonesia*, 7 Oct. 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201007155245-192-555553/awal-protres-omnibus-law-hingga-gaduh-di-media-sosial>, diakses pada 12 Oktober 2024.

- Santoso, Bambang, dkk. "Simulakra Teknologi Digital di Era Post Truth." *Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019*, (2019).
- Sastramidjaja, Yaton. "Beating the Buzzers." *Inside Indonesia*, <https://www.insideindonesia.org/editions/edition-146-oct-dec-2021/ beating-the-buzzers>, diakses pada 14 Oktober 2024.
- Silvestri, Filippo. "Baudrillard's Hyperreality and its Simulacral Foundation." *Rivista Italiana Di Filosofia Del Linguaggio*, 2022.
- Wijaya, Jonathan Adi, dkk. "Pendengung Politik dalam Perspektif Michel Foucault." *Akademika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero*, Vol. 23, No. 2 (2024).
- Yulianto, Hermawan. "Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia." *JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2023).